



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ERZALDI
2. Jabatan : GUBERNUR
3. NHK : 37290

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 6.162.747.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/220 m2 di KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.723.250.000
2. Tanah Seluas 19371 m2 di BANGKA TENGAH, HIBAH TANPA AKTA Rp. 523.017.000
3. Tanah Seluas 34286 m2 di BANGKA TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 171.430.000
4. Tanah Seluas 45754 m2 di BANGKA TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 228.770.000
5. Tanah Seluas 45782 m2 di BANGKA TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 228.910.000
6. Tanah Seluas 46953 m2 di BANGKA TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 234.765.000
7. Tanah Seluas 2125 m2 di BANGKA TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 76.500.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 4378 m2/70 m2 di BANGKA TENGAH, HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.172.480.000
9. Tanah Seluas 4250 m2 di BANGKA TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 153.000.000
10. Tanah Seluas 16875 m2 di BANGKA TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 50.625.000
11. Tanah dan Bangunan Seluas 213 m2/200 m2 di BANGKA TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000.000



B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	230.000.000
1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER JEEP Tahun 2011, HASIL SENDIRI		
		Rp. 230.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	1.933.050.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.215.673.136
F. HARTA LAINNYA	Rp.	885.636.393
Sub Total	Rp.	10.427.106.529
III. HUTANG	Rp.	803.469.018
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	9.623.637.511

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.